



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2020



1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone 2020 ; a. Berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah; c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan

yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2020 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 16 tahun 2016 tentang Penanaman Modal;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 tahun 2015 tentang Penyederhaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone;
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
26. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 tahun 2017 tentang Mekanisme dan tata cara Pelayanan perizinan dan Non perizinan pada Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Bone;
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun 2017 - 2025;

28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone;
29. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pelayanan perijinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pelayanan perijinan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

1.3. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs (suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut
4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tangga dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk di Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diteruskan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan penggabungan dua SKPD yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Kantor Promosi Penanaman Modal.

Tahun ini merupakan Tahun ke 3 (tiga) untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone selama tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

- B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2018

Anggaran Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 2.500.000.000,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp 3.100.000.000,- terdiri dari 11 Program dan 26 Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,34%. Dengan rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-	-
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pedapatan Daerah	Rp 423.224.000	408.624.000	<u>96,55%</u>	<u>100,00%</u>
2	Program Pengembangan Kemitraan			-	-
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Rp 139.233.000	132.228.000	<u>94,97%</u>	<u>100,00%</u>
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			-	-
	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Rp 249.702.000	236.492.000	<u>94,71%</u>	<u>100,00%</u>
	Pelayanan Administrasi Perizinan dan Fasilitasi tenaga Front Office	Rp 108.125.000	105.950.000	<u>97,99%</u>	<u>100,00%</u>

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan	Rp 4.725.000	4.725.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
5	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat			-	-
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp 80.095.000	75.455.000	<u>94,21%</u>	<u>100,00%</u>
	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 10.250.000	10.250.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			-	-
	Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	Rp 110.000.000	109.853.500	<u>99,87%</u>	<u>100,00%</u>
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Rp 112.240.000	112.215.000	<u>99,98%</u>	<u>100,00%</u>
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			-	-
	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.	Rp 21.830.000	21.830.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
	Peningkatan kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Rp 41.020.000	41.020.000	<u>100%</u>	<u>100,00%</u>
	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 31.400.000	31.400.000	<u>100%</u>	<u>100,00%</u>
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp 368.000.000	367.885.300	<u>99,97%</u>	<u>100,00%</u>
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (DPPA)	REALISASI		
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 119.031.000	113.909.000	<u>95,70%</u>	<u>100,00%</u>
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 137.290.000	136.628.788	<u>99,52%</u>	<u>100,00%</u>
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 6.299.000	6.299.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan	Rp 13.300.000	12.100.000	<u>90,98%</u>	<u>100,00%</u>
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 260.000.000	259.466.189	<u>99,79%</u>	<u>100,00%</u>
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 327.021.000	319.901.000	<u>97,82%</u>	<u>100,00%</u>
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 218.945.000	217.538.750	<u>99,36%</u>	<u>100,00%</u>
	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor	Rp 51.000.000	51.000.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 116.270.000	115.146.140	<u>99,03%</u>	<u>100,00%</u>
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 43.050.000	43.050.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Rp 55.075.000	55.075.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Rp 43.000.000	19.689.498	<u>45,79%</u>	<u>100,00%</u>
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan			-	-
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 9.875.000	9.875.000	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		Rp 3.100.000.000	Rp3.017.606.165	<u>97,34%</u>	<u>100,00%</u>

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2019 dengan usulan sebesar Rp. 7.500.000.000,- terurai dalam 9 program dan 33 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone namun masih ada beberapa sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan.

Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. Dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL)

Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) yang dapat memudahkan dalam proses Pelayanan Perizinan. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1	URUSAN WAJIB									
01.16	Penanaman Modal								-	
01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya adminitrasi perkantoran.							-	
1.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi(bulan)	12	48	12	12	100%	12	72	6
1.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya laporan penerimaan, pengeluaran dan Barang (bulan)	12	48	12	12	100%	12	72	6
1.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya kelengkapan alat kebersihan dan bahan pembersih (jenis)	17	34	17	17	100%	17	68	4
1.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya bahan bacaan surat kabar (bulan)	12	48	12	12	100%	12	72	6
1.16.01.23	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12	48	12	12	100%	12	72	6

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		12	48	12	12	100%	12	72	6
01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								-	
1.16.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor (unit)	1	-	-		-	0	-	-
1.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Aparatur	20	2			100%	20	22	1
1.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	terlaksananya perbaikan ruangan kantor (bulan)	12	48	12	12	100%	12	72	6
1.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional 9bulan)	12	48	12	12	100%	12	72	6
1.16.02.26	Pemeliharaan Rutin,berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpeliharanya perlengkapan kantor (bulan)	12		12	12	100%	12	24	2
01.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								-	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah aparatur yang mengikuti Diklatpim (orang)	2	1	2	2	100%	2	5	3
1.16.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (kec)	27	19	8	8	100%	27	54	2
1.16.05.03	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)					100%		-	
01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan								-	
1.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya Dokumen LAKIP dan LPPD (dok)	4	4	4	4	100%	4	12	3
1.16.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran (laporan)	0	-	2	2	100%	0		
1.16.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	tersedianya laporan keuangan dan Dokumen perencanaan Anggaran (dok)	0	-	1	1	100%	0		

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4
01.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								-	
1.16.15.06	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	terlaksananya koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal (orang)	50	12	50	50	100%	50	112	2
1.16.15.08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	terlaksananya Pemantauan, pembinaan Kinerja Usaha Investasi (keg)	6	12	6	6	100%	6	24	4
1.16.15.09	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	terwujudnya penyertaan Diklat Penanaman Modal dan PTSP (peserta)	100	12	100	100	100	100	212	2
1.16.15.10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	terwujudnya promosi produk unggulan dan kerjasama investasi dalam negeri 9keg)	4	4	4	4	100%	4	12	3
01.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								-	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4
1.16.16.01	Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur	terlaksananya sistem perizinan (dok)	1	0	0	0	0	1	1	1
1.16.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	terlaksananya pendataan realisasi perizinan dan Penanaman Modal (keg)	0	0	12	12	100%	0	12	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data izin dan Realisasi Investasi	terlaksananya pendataan realisasi perizinan dan Penanaman Modal (kec)	0	0	27	27	100%	0	27	
01.16.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya sarana dan prasarana Daerah								-	
1.16.17.01	Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	Tersusunnya Dokumen RUPM (dok)	0	0	1	1	100%	0	1	
01.20.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah								-	

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4)
1.20.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Perizinan (izin)	3500	8750	3500	3500	100%	3500	15.750	5
02.04.17	Program Pengembangan Kemitraan								-	
2.04.17.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya pengawasan di Bidang Perizinan	27		27	27	100%	27	54	2
01.16.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								-	
1.16.18.01	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	terlaksananya peninjauan lokasi Layanan Perizinan (Kec)	27	0	27	27	100%	27	54	2
1.16.18.02	Pelayanan Administrasi Perizinan dan Fasilitas tenaga Front Office	terlaksananya pelayanan administrasi perizinan (izin)	8750	0	8750	8750	100	8750	17.500	2
1.16.18.03	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan	terlaksananya penyusunan SOP Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (dok)	1		1	1	100%	1	2	2

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2013-2018)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan Kegiatan Renja Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2019	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11 = 10/4
01.20.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat								-	
1.20.24.02	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (responden)	150	300	200	200	100%	150	650	4
1.20.24.04	Penanganan Kasus Pengaduan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	terlaksananya pelayanan administrasi perizinan (kasus)	30	0	0	0	0	30	30	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam hal melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta sebagai panduan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel/simultan dengan adanya Tim Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait perizinan dan juga Unsur DPMPSTSP yang bertugas antara lain :

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website *www. bp2t_bone.id* dan ditahun 2017 berubah nama menjadi *www. dpmptsp.bone.go.id* dan sms gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendaftaran izin secara online, perhitungan retribusi IMB, tracking dokumen serta masyarakat dapat mendownload permohonan izin.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2017 – 2018.

Tabel 2.1.3
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur		70	75	75		70			
			Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dok)		1	1	1		1			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)		0	4	4		0			
			Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)		1	1	1		1			
			Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)		1	1	1		1			
2	Persentase Rumah Ber-IMB		Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur		70	75	75		70			
			Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)		3500	1500	1600		3500			
3	Persentase Usaha Perdagangan yang dilengkapi izin usaha		Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur		70	75	75		70			
			Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)		6000	7000	7200		6000			
			Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)		1	1	1		1			
			Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)		6000	7000	7200		6000			
			Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)		0	7	2		0			

4	Nilai PMDN / PMA per tahun	Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)	43	50	60	43			
		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	0	1	2	0			
		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	6	40	50	6			
		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	100	100	100			
		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	4	4	4			
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	135.925	150	175	135.925			
		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evauasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	0	1	1	0			
		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	0	1	1	0			
		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	0	4	4	0			
		Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)	5	65	75	5			
		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	1	1	1			
		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	1	1	1			

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bone;

- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

2. Sumber Daya Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan yang lebih baik dalam menunjang peningkatan Iklim Investasi.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Pemeliharaan Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bone menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

- 1). Globalisasi

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;

- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

Dampak

Belum adanya regulasi Insentif Penanaman Modal sangat berpengaruh terhadap peningkatan Ikim Investasi sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga Perangkat Daerah baik vertikal maupun horizontal. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencanaan.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan sebagai perwujudan *good governance*.
2. Belum adanya Data peta investasi dan perizinan yang akurat.

Peluang

1. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
3. Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL);
4. Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu;
5. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor;

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ;

1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.
2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.
3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang aturan / prosedur yang berlaku
5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan kedinasan secara umum
6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman
7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.

Dalam menyikapi isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu melaksanakan pelatihan bagi aparatur dalam hal penggunaan aplikasi perizinan, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perizinan dan penanaman modal serta pembuatan RUPM dan Video Profil Potensi investasi Kabupaten Bone serta keikutsertaan dalam kegiatan Promosi investasi dalam hal ini pameran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2012 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Rek telepon, TV Kabel (Rekening)	36	132.792.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Rek telepon, TV Kabel (Rekening)	36	132.792.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan (orang)	47	37.897.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan (orang)	47	37.897.200	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	20	9.023.300	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	20	9.023.300	
			Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapat Jasa/Upah Kerja (Orang)	1	6.600.000			Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapat Jasa/Upah Kerja (Orang)	1	6.600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah media bahan bacaan yang tersedia (jenis)	13	14.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah media bahan bacaan yang tersedia (jenis)	13	14.630.000	
			Jumlah media yang menayangkan iklan (Jenis)	2	26.400.000			Jumlah media yang menayangkan iklan (Jenis)	2	26.400.000	
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi (kali)	75	325.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi (kali)	75	325.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis pendukung Pelaksanaan Administrasi (jenis)	3	271.113.040	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis pendukung Pelaksanaan Administrasi (jenis)	3	271.113.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)	100		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)	100		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	150.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	150.000.000	
	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	20	150.000.000	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	20	150.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor diperbaiki (unit)	1	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor diperbaiki (unit)	1	100.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin (unit)	17	127.897.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin (unit)	17	127.897.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	40	47.355.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	40	47.355.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	77	47.355.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	77	47.355.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang dipelihara secara rutin (unit)	20	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang dipelihara secara rutin (unit)	20	20.000.000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)	100		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	73	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	73	75.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	100		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	100		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	2	44.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	2	44.250.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Kecamatan pelaksanaan Sosialisasi (Kecamatan)	6	62.242.400	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Kecamatan pelaksanaan Sosialisasi (Kecamatan)	6	62.242.400	
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)	12	75.000.000	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)	12	75.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)	100		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan		Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	4	10.362.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	4	10.362.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	1	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	1	15.000.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	2	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	2	15.000.000	
	Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)	100		Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)	100		
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (dok)	6	36.102.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (dok)	6	36.102.000	
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah		Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPSTSP (paket)	1	29.419.500	Pengelolaan Website Perangkat Daerah		Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPSTSP (paket)	1	29.419.500	
	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)	60		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)	60		
	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	2	29.905.700	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	2	29.905.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	50	22.500.500	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	50	22.500.500	
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	36.751.000	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	36.751.000	
	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	280.667.420	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	280.667.420	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	175		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	175		
	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evaluasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	1	16.620.450	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evaluasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	1	16.620.450	
	Peningkatan pelayanan Investasi		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	1	18.320.170	Peningkatan pelayanan Investasi		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	1	18.320.170	
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	4	25.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	4	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)	75		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)	75		
	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	31.442.290	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	31.442.290	
	Penyusunan Data Peluang Investasi		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	15.829.000	Penyusunan Data Peluang Investasi		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	15.829.000	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur	75		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur	75		
	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan		Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	1600	115.993.900	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan		Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	1600	115.993.900	
	Pelayanan administrasi perizinan		Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	7200	113.476.750	Pelayanan administrasi perizinan		Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	7200	113.476.750	
	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)	1	5.197.390	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)	1	5.197.390	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	7200	436.437.980	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	7200	436.437.980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan		Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)	2	96.305.000	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan		Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)	2	96.305.000	
	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dok)	1	43.553.510	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dok)	1	43.553.510	
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)	4	103.939.880	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)	4	103.939.880	
	Penanganan Pengaduan Pelayanan		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	1	15.714.710	Penanganan Pengaduan Pelayanan		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	1	15.714.710	
	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan		Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	1	96.305.000	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan		Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	1	96.305.000	

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal.

Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki Tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
- Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai PMDN/ PMA pertahun

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023

NO	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	4
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

NO	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	4
II	Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
III	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMDN / PMA per tahun

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan pengembangan potensi dan produk unggulan daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah..

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penunjang Pemerintahan Umum

Tabel 3.1.2
Uraian Kegiatan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal - Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi - Penyelenggaraan pameran investasi
2	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi - Penyusunan Data Peluang Investasi
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan - Pelayanan administrasi perizinan - Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan - Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan - Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat - Penanganan Pengaduan Pelayanan - Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan
3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal - Peningkatan pelayanan Investasi - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 3.1.3
Uraian Kegiatan Program Penunjang Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan - Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Formal - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan - Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6	Program Penunjang Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Perangkat Daerah - Pengelolaan Website Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2020 merencanakan 10 (sepuluh) Program serta 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 6 kegiatan:**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
 - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah;
 - f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 9 kegiatan:**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Pengadaan Meubeleur;
 - e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan :**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 3 Kegiatan :**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan;
 - c. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 kegiatan:**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - c. Penyusunan Laporan Semesteran.
- 6. Program penunjang pemerintahan umum, terdiri dari 2 kegiatan ;**
- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah;
 - b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah.
- 7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, terdiri dari 4 kegiatan:**
- a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
 - b. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
 - d. Penyelenggaraan pameran investasi.
- 8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, terdiri dari 3 kegiatan:**
- a. Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Peningkatan Pelayanan Investasi;
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal,
- 9. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, terdiri dari 2 kegiatan ;**
- a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi;
 - b. Penyusunan data peluang investasi.
- 10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, terdiri dari 9 kegiatan;**
- a. Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan;
 - b. Pelayanan Administrasi Perizinan;
 - c. Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pelayanan Perizinan;
 - d. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan perizinan;
 - e. Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan perizinan;
 - f. Layanan Pengarsipan dan penerbitan Perizinan;
 - g. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
 - h. Penanganan Pengaduan Pelayanan;
 - i. Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01	URUSAN WAJIB								
01.16	PENANAMAN MODAL								
01.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	1.023.455.540			100	
1.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Rek telepon, TV Kabel dan Listrik (Rekening)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	36	132.792.000	APBD Kabupaten		36	146.071.200
1.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan selama setahun (orang)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	47	37.897.200	APBD Kabupaten		47	41.686.920
1.16.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Pengadaan alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	20	9.023.300	APBD Kabupaten		20	9.925.630
		- Jumlah Jasa Kebersihan selama setahun (kali)		1	6.600.000			1	7.260.000
1.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	13	14.630.000	APBD Kabupaten		13	16.093.000
		- Jumlah pembayaran media yang menayangkan iklan (kali)		2	26.400.000			3	29.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.16.01.23	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi ketingkat Nasional, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten yang diikuti (kali)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	75	525.000.000	APBD Kabupaten		85	577.500.000
1.16.01.24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3	271.113.040	APBD Kabupaten		3	298.224.344
01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)		100	1.307.607.000			100	
1.16.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	APBD Kabupaten		2 Kendaraan Roda 2	50.000.000
1.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3	15.000.000	APBD Kabupaten		3	100.000.000
1.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor (unit)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15	150.000.000	APBD Kabupaten		15	35.000.000
1.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	20	150.000.000	APBD Kabupaten		20	35.000.000
1.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pmeliharaan Gedung Kantor (Kegiatan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	100.000.000	APBD Kabupaten		1	110.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / operasional (paket)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	17	127.897.000	APBD Kabupaten		17	140.686.700
1.16.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor (unit)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	40	47.355.000	APBD Kabupaten		43	52.090.500
1.16.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor (unit)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	77	47.355.000	APBD Kabupaten		77	52.090.500
1.16.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Mebeleur (unit)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	20	20.000.000	APBD Kabupaten		20	22.000.000
01.16.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)		100	75.000.000			-	
1.16.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	73	75.000.000	APBD Kabupaten		-	-
01.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	181.492.400			100	
1.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	44.250.000	APBD Kabupaten		2	44.250.000
1.16.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pelaksanaan Sosialisasi ke kecamatan (Kegiatan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	6	62.242.400	APBD Kabupaten		5	68.466.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.16.05.03	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	75.000.000	APBD Kabupaten		10	82.500.000
01.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)		100	40.362.000			100	
1.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (laporan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	10.362.000	APBD Kabupaten		4	11.398.200
1.16.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran (laporan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	15.000.000	APBD Kabupaten		1	16.500.000
1.16.05.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (laporan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	15.000.000	APBD Kabupaten		2	16.500.000
01.16.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)		100	65.521.500			100	
1.16.08.01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun (dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	6	36.102.000	APBD Kabupaten		6	39.712.200
1.16.08.02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPTSP (paket)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	29.419.500	APBD Kabupaten		1	32.361.450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.16.15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	60	369.824.620			65	
01.16.15.06	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	29.905.700	APBD Kabupaten		3	32.896.270
01.16.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50	22.500.500	APBD Kabupaten		60	24.750.550
01.16.15.09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	36.751.000	APBD Kabupaten		100	40.426.100
01.16.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	280.667.420	APBD Kabupaten		4	308.734.162
01.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	175	59.940.620			200	44.605.000
1.16.16.04	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	25.000.000	APBD Kabupaten		4	27.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
01.16.16.11	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evaluasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	16.620.450	APBD Kabupaten		1	18.282.495
01.16.16.12	Peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	18.320.170	APBD Kabupaten		1	20.152.187
01.16.17	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)		75	47.271.290			80	
1.16.17.01	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan evaluasi RUPM (dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	31.442.290	APBD Kabupaten		1	34.586.519
1.16.17.02	Penyusunan Data Peluang Investasi	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	15.829.000	APBD Kabupaten		1	17.411.900
01.16.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur	Kecamatan Tanete Riattang Barat	75	945.396.980			80	
1.16.18.01	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan	Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1600	115.993.900	APBD Kabupaten		1.700	127.593.290

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.16.18.02	Pelayanan administrasi perizinan	Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7200	113.478.750	APBD Kabupaten		7.500	124.826.625
1.16.18.03	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	5.197.390	APBD Kabupaten		1	5.717.129
1.16.18.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan	Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	43.553.510	APBD Kabupaten		1	47.908.861
1.16.18.05	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	103.939.880	APBD Kabupaten		4	114.333.868
1.16.18.06	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan	Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	7200	436.437.980	APBD Kabupaten		7.500	480.081.778
1.16.18.07	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	14.775.860	APBD Kabupaten		1	16.253.446
1.16.18.08	Penanganan Pengaduan Pelayanan	Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	15.714.710	APBD Kabupaten		1	17.286.181
1.16.18.09	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan	Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dokumen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	96.305.000	APBD Kabupaten		2	105.935.500

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Tahun 2020.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2020, Renja Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2020 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
5. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2020, sesuai dengan

TUPOKSI masing-masing. Hasil *evaluasi* dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian Keuangan.

6. Renja Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif / kemudahan kepada penanam modal dan kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Tahun 2020, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.